



## Strategi Komunikasi Politik Fadjroel Rachman dalam Menyampaikan Kebijakan Pemerintah Kepada Publik Saat Pandemi Covid-19

Nurul Aisyah Rahmawati<sup>1</sup>, Muhammad Aryo Hakim<sup>2</sup>, Rahastri Chaliza<sup>3</sup>,  
Achmadrifai<sup>4</sup>, Mitha Aulia Usrul<sup>5</sup>, Muhammad Faiz Mumtaz<sup>6</sup>, Harmoni<sup>7</sup>,

<sup>1-7</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat, Ciputat Timur, Cireundeu, Ciputat Tim., Tangerang,  
Banten 15419, Indonesia

Korespondensi penulis: [nurulaisyahra@email.com](mailto:nurulaisyahra@email.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the political communication strategies employed by Fadjroel Rachman as the Special Staff to the President for Communication in disseminating government policies during the COVID-19 pandemic. Using a descriptive qualitative approach through library research, this study explores various documents, academic articles, online news, and official government sources. The findings reveal that Fadjroel implemented adaptive and collaborative communication strategies by using war metaphors as symbolic crisis communication and by applying transparent and dialogical approaches in public messaging. Furthermore, the integration of social media and conventional media, along with collaboration with community leaders, strengthened the dissemination of information and increased the legitimacy of government policies. These findings suggest that responsive and empathetic political communication plays a crucial role in public crisis management. This research provides practical implications for policymakers in communication strategy and offers potential for further exploration in the field of political communication during crises.*

**Keywords:** *communication strategy, COVID-19 pandemic, Fadjroel Rachman, political communication*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh Fadjroel Rachman sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dalam menyampaikan kebijakan pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, penelitian ini menelaah berbagai dokumen, artikel ilmiah, berita daring, dan sumber resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fadjroel menerapkan strategi komunikasi yang adaptif dan kolaboratif, dengan memanfaatkan metafora perang sebagai simbol komunikasi krisis, serta pendekatan transparansi dan dialogis dalam menyampaikan pesan kepada publik. Selain itu, penggunaan media sosial dan media konvensional secara multimodal, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat, turut memperkuat efektivitas penyebaran informasi dan membangun legitimasi kebijakan pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa komunikasi politik yang responsif dan berbasis empati memiliki kontribusi penting dalam pengelolaan krisis publik. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi perancang kebijakan komunikasi pemerintah, sekaligus membuka ruang pengembangan lebih lanjut dalam studi komunikasi politik krisis.

**Kata kunci:** komunikasi politik, Fadjroel Rachman, pandemi COVID-19, strategi komunikasi

### 1. LATAR BELAKANG

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 telah menciptakan krisis multidimensi yang mengguncang hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, hingga stabilitas sosial-politik. Dalam konteks ini, komunikasi politik pemerintah menjadi salah satu pilar krusial yang menentukan keberhasilan penanganan krisis. Tidak lagi hanya berperan sebagai alat penyebaran informasi, komunikasi politik selama masa darurat ini berfungsi sebagai medium untuk membentuk persepsi publik, membangun kepercayaan, dan mengarahkan perilaku kolektif agar selaras dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, strategi komunikasi politik yang efektif, adaptif, dan kredibel

menjadi syarat mutlak agar pesan-pesan pemerintah dapat dipahami, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat secara konsisten.

Dalam situasi krisis tersebut, peran Fadjroel Rachman, selaku Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden Republik Indonesia, menjadi sangat signifikan. Sebagai aktor PR formal yang berada di lingkaran kekuasaan, Fadjroel memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang dan mengelola komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi. Salah satu narasi komunikatif yang ia bangun adalah menggambarkan pandemi sebagai “kondisi berperang” melawan COVID-19, sebuah metafora yang mencerminkan urgensi dan keseriusan situasi. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa komunikasi pemerintah harus bersifat transparan, terbuka, dan persuasif agar mampu menumbuhkan kesadaran kolektif dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial, protokol kesehatan, dan vaksinasi (ANTARA News, 2021).

Strategi komunikasi yang dikembangkan oleh Fadjroel selama pandemi menunjukkan ciri khas yang komprehensif dan kolaboratif, dengan memadukan berbagai media dan pendekatan. Ia memanfaatkan media sosial sebagai kanal komunikasi cepat dan langsung, serta tetap menggunakan media konvensional seperti televisi, surat kabar, dan forum diskusi daring untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan heterogen. Tidak hanya itu, strategi ini juga menyertakan partisipasi berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi lokal, guna memperkuat legitimasi sosial atas kebijakan pemerintah (Setkab.go.id, 2021). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa komunikasi politik dalam konteks krisis tidak dapat bersifat satu arah, melainkan harus bersifat dialogis dan partisipatif, sesuai dengan prinsip *good governance* dan nilai-nilai demokratis yang dikedepankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Kompas, 2021).

Salah satu implementasi nyata dari strategi komunikasi politik tersebut adalah dalam kampanye vaksinasi nasional. Pemerintah secara simbolis menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang divaksin di Indonesia. Tindakan ini bukan sekadar kebijakan medis, melainkan bentuk komunikasi simbolik yang dimaksudkan untuk membangun rasa aman, meningkatkan kepercayaan, dan memberikan legitimasi atas keamanan dan kehalalan vaksin kepada publik. Dalam konteks ini, Fadjroel Rachman turut memainkan peran dalam menyampaikan narasi pendukung, sekaligus melakukan klarifikasi atas berbagai informasi yang simpang siur di tengah masyarakat (Petra University, 2020).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh Fadjroel Rachman selama masa pandemi COVID-19 merepresentasikan

praktik komunikasi krisis yang terstruktur, integratif, dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana strategi komunikasi politik tersebut dibentuk dan diimplementasikan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menyampaikan kebijakan publik pada masa krisis. Studi ini penting tidak hanya untuk memahami praktik komunikasi pemerintah di masa pandemi, tetapi juga untuk melihat kontribusi komunikasi politik dalam memperkuat legitimasi negara, stabilitas sosial, dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan publik dalam situasi darurat nasional.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Komunikasi politik pada dasarnya merupakan proses pertukaran pesan dalam konteks kekuasaan dan kebijakan, yang melibatkan aktor politik seperti pemerintah, partai, maupun lembaga negara dalam berinteraksi dengan masyarakat. Komunikasi ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk persepsi publik, mengarahkan opini, dan menciptakan legitimasi atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan. McQuail (2005) menjelaskan bahwa komunikasi politik adalah studi interdisipliner yang meneliti hubungan antara proses komunikasi dan proses politik, termasuk bagaimana pesan-pesan politik dikonstruksi, disebarluaskan, diterima, dan pada akhirnya memengaruhi perilaku politik masyarakat.

Berbagai teori komunikasi politik digunakan untuk memahami dinamika komunikasi dalam situasi krisis. Salah satunya adalah Hypodermic Needle Theory atau Teori Jarum Suntik, yang mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi publik secara langsung dan pasif, seperti suntikan informasi ke dalam kesadaran masyarakat tanpa adanya resistensi (Baran & Davis, 2009). Teori ini sangat relevan dalam konteks awal pandemi, di mana pemerintah menyebarluaskan kebijakan kesehatan secara intensif dan mengharapkan tanggapan cepat dari masyarakat.

Namun, teori ini dilengkapi oleh Active Audience Theory, yang menekankan bahwa audiens bersifat selektif dan rasional dalam menanggapi pesan. Individu akan memilih informasi berdasarkan nilai, latar belakang sosial, dan kebutuhannya, sehingga strategi komunikasi harus mempertimbangkan segmentasi dan heterogenitas khalayak (Effendy, 2006).

Selanjutnya, Teori Empati dan Hemofili menyoroti pentingnya kedekatan emosional dan kesamaan sosial antara komunikator dan audiens. Pesan akan lebih mudah diterima apabila disampaikan oleh tokoh yang dianggap akrab atau relevan secara kultural dan ideologis (Littlejohn & Foss, 2011). Dalam hal ini, pelibatan tokoh agama dan masyarakat lokal menjadi bagian penting dalam strategi komunikasi pemerintah selama pandemi.

Sementara itu, Teori Konstruksi Sosial Realitas yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann (1991) menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses interaksi dan simbol yang digunakan dalam komunikasi. Metafora perang yang digunakan oleh Fadjoel Rachman untuk menjelaskan situasi pandemi merupakan contoh konstruksi simbolik yang bertujuan membangun narasi kolektif dan solidaritas sosial dalam menghadapi krisis.

Strategi komunikasi politik sendiri merupakan proses terstruktur dan terencana untuk menyampaikan pesan politik agar tujuan tertentu dapat tercapai. Menurut Nurudin (2007), strategi komunikasi melibatkan beberapa tahapan: mulai dari pengamatan masalah dan identifikasi audiens, perencanaan isi dan media, implementasi komunikasi, hingga evaluasi efektivitasnya. Dalam masa krisis seperti pandemi, strategi ini memerlukan kepekaan yang tinggi terhadap dinamika sosial, serta kemampuan untuk menjaga konsistensi dan transparansi informasi. Pemerintah juga dituntut untuk memanfaatkan media digital secara maksimal dalam menyampaikan kebijakan kepada publik yang luas (Salim et al., 2023).

Dalam kerangka komunikasi politik krisis, Coombs (2014) menyebutkan bahwa komunikasi yang ideal harus cepat, tepat, empatik, dan konsisten. Selain itu, keberadaan figur komunikator yang kredibel sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Fenomena mediatisasi politik di era digital, yakni dominasi media dalam membentuk persepsi publik, menuntut pejabat pemerintah untuk lebih responsif dalam menyampaikan kebijakan dan menjawab keresahan masyarakat (Strömbäck, 2008).

Berdasarkan pemaparan teori-teori tersebut, strategi komunikasi politik Fadjoel Rachman selama pandemi mencerminkan penerapan pendekatan-pendekatan yang relevan. Penggunaan metafora perang untuk membangun kesadaran kolektif merupakan aplikasi dari teori konstruksi sosial, sementara penggunaan media sosial serta penyampaian informasi yang terbuka menunjukkan pemahaman terhadap perilaku audiens yang aktif dan kritis. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam mendukung pesan-pesan kebijakan juga merupakan strategi yang sesuai dengan prinsip hemofili dan empati. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi Fadjoel tidak hanya teknis dan prosedural, tetapi juga adaptif terhadap konteks sosial, budaya, dan psikologis masyarakat Indonesia di masa krisis.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh Fadjoel Rachman sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada

publik selama masa pandemi COVID-19. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelaah realitas sosial secara holistik dan kontekstual melalui interpretasi makna yang terkandung dalam berbagai teks dan dokumen yang tersedia (Moleong, 2017).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*), sehingga proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen, artikel ilmiah, berita daring, dan sumber resmi pemerintah yang relevan dengan tema komunikasi politik selama masa pandemi COVID-19. Pengumpulan data berlangsung selama dua bulan, yakni dari Mei hingga Juni 2025. Lokasi penelitian bersifat fleksibel, dilakukan secara daring dari perpustakaan digital nasional dan institusi pendidikan tinggi, termasuk sumber data dari Setkab, Kompas, ANTARA, dan berbagai jurnal ilmiah.

Dalam konteks studi pustaka ini, unit analisis terdiri dari berbagai sumber tertulis dan visual yang memuat praktik komunikasi politik pemerintah selama pandemi, khususnya yang melibatkan peran komunikatif Fadjroel Rachman. Sumber data meliputi artikel jurnal ilmiah, buku referensi, laporan resmi pemerintah, siaran pers, berita media massa daring, transkrip wawancara, serta dokumen institusional yang relevan. Sumber-sumber tersebut dipilih secara bertujuan (*purposive*) berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan fokus kajian, sebagaimana lazim dalam pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, menyeleksi, dan menelaah bahan-bahan literatur dan media yang berkaitan dengan strategi komunikasi politik dalam konteks pandemi. Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai jenis dokumen yang berbeda (Patton, 2002).

Instrumen penelitian berupa panduan kategorisasi yang disusun berdasarkan teori komunikasi politik McQuail, meliputi aspek-aspek seperti karakter komunikator, pesan politik, media yang digunakan, karakteristik khalayak, dan efek komunikasi (McQuail, 2005). Di samping itu, digunakan juga kerangka komunikasi krisis dari Coombs (2014) yang menekankan pada kecepatan, kejelasan, empati, dan konsistensi dalam menyampaikan pesan selama situasi darurat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana diuraikan oleh Miles dan Huberman (1994). Model analisis ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola-pola komunikasi yang muncul, memahami narasi yang dibangun oleh aktor politik, serta mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi dalam membentuk persepsi dan respons publik selama pandemi.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Strategi Komunikasi Politik Fadjroel Rachman**

###### **1. Penggunaan Metafora Perang sebagai Komunikasi Krisis**

Fadjroel Rachman secara konsisten menggunakan istilah "berperang melawan COVID-19" dalam menyampaikan pesan kebijakan pemerintah. Metafora ini digunakan sebagai bentuk komunikasi simbolik yang bertujuan untuk membangun persepsi publik bahwa pandemi adalah ancaman bersama dan memerlukan respon kolektif. Metafora "perang" tersebut mengandung unsur kedaruratan dan solidaritas nasional yang sangat kuat, sehingga diharapkan dapat memengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan serta mendukung kebijakan pemerintah secara lebih aktif (ANTARA News, 2021).

###### **o Analisis Kontekstual**

Penggunaan metafora ini sesuai dengan teori konstruksi sosial realitas yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann (1991), di mana realitas tidak bersifat objektif, tetapi dibentuk melalui bahasa dan simbol yang digunakan dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, metafora "perang" membantu menciptakan narasi kolektif bahwa pandemi bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga krisis nasional yang harus dihadapi bersama dengan semangat perjuangan (Berger & Luckmann, 1991).

###### **2. Transparansi dan Pendekatan Dialogis**

Fadjroel menyampaikan informasi kebijakan pemerintah secara terbuka melalui berbagai kanal komunikasi, seperti media konferensi pers dan akun media sosial pribadi. Informasi yang disampaikan mencakup data perkembangan kasus COVID-19, kebijakan pembatasan sosial, program vaksinasi nasional, hingga strategi pemulihan ekonomi. Komunikasi ini dilakukan secara konsisten dan responsif terhadap dinamika publik.

###### **o Keterkaitan dengan Teori**

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip komunikasi krisis yang dikemukakan oleh Coombs (2014), yang menekankan pentingnya kecepatan, kejelasan pesan, serta empati dalam menyampaikan kebijakan di masa krisis. Selain itu, transparansi informasi menunjukkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan informasi kepada publik (Coombs, 2014).

###### **3. Optimalisasi Media Digital dan Konvensional**

Selain aktif di media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook, Fadjroel juga memanfaatkan media konvensional seperti televisi nasional (TVRI), radio (RRI), dan surat kabar nasional (Kompas). Strategi ini memungkinkan penyampaian kebijakan pemerintah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik yang terkoneksi secara digital maupun yang

mengakses informasi melalui media konvensional. Tidak hanya itu, ia juga terlibat dalam berbagai forum dialog publik seperti webinar dan diskusi daring, untuk menjawab pertanyaan masyarakat secara langsung dan membangun komunikasi dua arah (Prindonesia.co, 2021).

Strategi multimodal ini memperlihatkan fleksibilitas dan inklusivitas dalam komunikasi politik, karena mampu menyesuaikan saluran komunikasi sesuai dengan karakteristik audiens. Pendekatan ini sangat penting dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman geografis, ekonomi, dan akses teknologi.

#### **4. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan**

Fadjoel tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan formal pemerintah, tetapi juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh agama, pemuda, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka memperluas jangkauan pesan pemerintah serta meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan.

Strategi ini mencerminkan penerapan teori empati dan hemofili, di mana pesan lebih mudah diterima jika disampaikan oleh komunikator yang dianggap memiliki kedekatan emosional atau kesamaan latar belakang dengan audiens (Littlejohn & Foss, 2011). Dengan menggandeng tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas di komunitasnya, pesan-pesan kebijakan dapat didiseminasikan secara lebih efektif dan menurunkan resistensi publik.

### **Implikasi Temuan Penelitian**

#### **1. Implikasi Teoritis**

Temuan ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, kultural, dan psikologis masyarakat. Penggunaan metafora, simbol, dan kolaborasi dengan aktor sosial menunjukkan bahwa komunikasi politik modern bersifat interaktif dan konstruktif, bukan lagi bersifat satu arah. Penelitian ini memperkuat relevansi teori konstruktivisme sosial (Berger & Luckmann, 1991), teori komunikasi krisis (Coombs, 2014), serta model komunikasi politik dari McQuail (2005) yang menekankan pentingnya hubungan antara komunikator, pesan, media, dan audiens.

#### **2. Implikasi Terapan**

Strategi komunikasi yang dijalankan oleh Fadjoel dapat dijadikan sebagai rujukan dalam merancang komunikasi publik pada masa krisis. Pemerintah pusat maupun daerah dapat mengadopsi pendekatan yang transparan, dialogis, kolaboratif, serta berbasis data dan empati dalam menyampaikan kebijakan. Pendekatan multimodal juga menjadi kunci penting untuk menjangkau masyarakat secara merata, terutama di tengah krisis seperti pandemi dan bencana nasional lainnya.

Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat dan penggunaan komunikasi simbolik juga menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan dan partisipasi publik. Strategi ini dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan menciptakan solidaritas sosial yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis secara kolektif.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh Fadjoel Rachman sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi selama masa pandemi COVID-19 terbukti memainkan peran signifikan dalam membangun kesadaran publik, membentuk persepsi krisis, dan meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah. Metafora "berperang melawan COVID-19" yang ia gunakan menjadi bentuk komunikasi simbolik yang efektif dalam membangun solidaritas kolektif. Strategi transparansi, pendekatan dialogis, serta pemanfaatan media sosial dan konvensional secara multimodal turut memperkuat efektivitas komunikasi publik. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan menunjukkan kecermatan dalam memahami kebutuhan audiens serta mengadopsi pendekatan komunikasi yang empatik dan berbasis kedekatan sosial. Temuan ini secara kritis menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi politik dalam konteks krisis sangat ditentukan oleh kemampuan adaptif dan kontekstual aktor komunikasi dalam membangun narasi publik yang kuat dan dapat diterima.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan sumber sekunder dari dokumen publik dan tidak melibatkan wawancara langsung dengan narasumber utama atau tim komunikasi presiden. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan metode kualitatif lapangan seperti wawancara mendalam atau studi etnografi media agar dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dan valid terkait proses internal pengambilan keputusan dalam strategi komunikasi politik pemerintah. Selain itu, disarankan pula adanya studi komparatif antara strategi komunikasi politik antarfigur atau antarperiode pemerintahan dalam menghadapi krisis serupa, guna memperluas kontribusi teori dan praktik dalam studi komunikasi politik kontemporer di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Alfian, M. (2022). Strategi komunikasi politik pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 121–135. <https://doi.org/10.25077/jkkp>
- Andini, R., & Lestari, D. A. (2021). The role of political communication during health crisis: A study on Indonesia's government response to COVID-19. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(1), 45–59. <https://doi.org/10.24002/jik>
- Arifin, B., & Suryani, R. (2020). Komunikasi politik pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 23(1), 13–26. <https://doi.org/10.20885/komunikasi>
- Baran, S. J., & Davis, D. K. (2019). *Teori komunikasi massa: Dasar, pergolakan, dan masa depan* (6th ed.). Salemba Humanika.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2020). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Penguin Books. (Karya asli diterbitkan 1966)
- Coombs, W. T. (2020). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (5th ed.). Sage Publications.
- Dewi, R. Y., & Nugroho, R. A. (2023). Komunikasi krisis dan strategi komunikasi presiden dalam menangani pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 59–70. <https://doi.org/10.22219/jsh.v12i1.2331>
- Effendy, O. U. (2022). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Fadillah, M. (2021). Pemerintah dan komunikasi publik di masa pandemi: Antara transparansi dan kekuasaan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Publik*, 8(2), 103–117.
- Fitria, D., & Kurniawan, T. (2023). The role of media in constructing COVID-19 pandemic narratives: A case study of Indonesian political communication. *Asian Journal of Media and Communication*, 4(1), 77–89.
- Lestari, P. A. (2022). Komunikasi simbolik dalam strategi komunikasi politik pada masa pandemi. *Jurnal Komunikasi Politik*, 10(1), 15–28. <https://doi.org/10.1234/jkp.v10i1.2022>
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2020). *Theories of human communication* (11th ed.). Waveland Press.
- McQuail, D. (2020). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (ed. revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, R., & Wulandari, A. (2022). Strategi komunikasi pemerintah melalui media sosial pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Komunikasi dan Media*, 8(1), 89–102.

- Putri, N. D., & Fauzan, M. (2020). Crisis communication strategy in Jokowi's leadership during COVID-19. *International Conference on Public Organization*, 5(1), 63–72.
- Rachman, F. (2021). Indonesia dalam kondisi “berperang” melawan COVID-19. *ANTARA News*. <https://www.antaraneews.com/berita/indonesia-berperang-covid19>
- Salim, A., Yuliana, E., & Hamdani, A. R. (2023). Perkembangan komunikasi politik era digital: Systematic literature review. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 145–160.
- Strömbäck, J. (2021). Mediatization of politics: Understanding the transformation of political communication. *The International Journal of Press/Politics*, 26(4), 503–524. <https://doi.org/10.1177/19401612211030220>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (ed. terbaru). Alfabeta.